

**Penggunaan Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBD Pemerintah  
Kabupaten Pamekasan Ta 2013 S/D 2015**

Fadali Rahman<sup>1</sup>

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menilai kinerja anggaran pemerintah kabupaten Pamekasan melalui keberhasilan sebagai akuntabilitas bidang manajemen keuangan pada tahun fiskal 2013 s / d 2015. Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan lokal masih relatif sangat rendah dengan rata-rata skor 14,62% <25, dengan kategori kinerja tidak baik. Rasio efektivitas pendapatan daerah sangat efektif karena setiap tahun rasio persentase lebih dari 100%, dengan rata-rata 122,03% memiliki skor > 76 dengan kategori kinerja yang sangat baik. Rasio kegiatan: rasio pengeluaran berulang rata-rata 78,48% skor > 76 dengan kinerja yang sangat baik dan rata-rata rasio pengeluaran pembangunan skor 18,12% <25 kinerja tidak baik. Rasio Cakupan Layanan Hutang dengan skor rata-rata 32,29% <50 dengan kinerja yang memadai dan rasio pertumbuhan rata-rata skor 37,86% <50 dengan kinerja yang memadai

**Kata Kunci:** Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), Efektivitas Rasio Pendapatan (REPAD), Rasio Kegiatan: Rasio Exp Rutin (RBR) dan bangunan memiliki Rasio Pengeluaran (RPB), Rasio Cakupan Layanan Utang (RDSCR) dan Tingkat Pertumbuhan (RP)

**Abstract**

The Purpose of this research are: To assess budget performance district of Pamekasan government through success as accountability of financial management area in fiscal year 2013 s/d 2015. This research shows that the ratio of local financial independence is still relatively very low with an average of 14.62 % score < 25, with performance category is not good . The ratio of the effectiveness of local revenues are very effective because each year the percentage ratio is more than 100 % , with an average of 122.03 % had scores > 76 with excellent performance categories . Activities ratio : the ratio of recurrent expenditure on average 78.48 % the scoring > 76 with excellent performance and development expenditure ratio average of 18.12 % score < 25 the performance is not good . Debt Service Coverage Ratio of average 32.29 % score < 50 with sufficient performance and the ratio of growth average of 37.86 % score < 50 with sufficient performance

**Keywords:** Regional Financial Independence Ratio ( RKKD ) ,Effectiveness of revenue Ratio ( REPAD ) , Activity Ratios : Exp Routine Ratio ( RBR ) and the building have Expenditure Ratio ( RPB ) , Ratio of Debt Service Coverage Ratio ( RDSCR ) and Growth Rate ( RP )

**Pendahuluan**

---

<sup>1</sup>Dosen iai al-khairat pamekasan Prodi perbankan syariah.

Dengandiberlakukannya kewenangan Otonomi Daerah, diharapkan semua Daerah di Indonesia mampumelaksanakan semua urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu padaPendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya. Semua peraturan tentang Pemerintah Daerah yang atur dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia, selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan atau disingkat dengan (PERDA), penulis dalam hal ini mengacu kepada PERDA nomer 18 tahun 2012, PERDA nomor 19 Tahun 2013 dan PERDA nomer 21 Tahun 2014, karena penulis akan menganalisis rasio keuangan dari tahun anggaran 2013-2015.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Pemerintah Daerah secara keseluruhan maupun unit- unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untukmembantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial maupun nonfinansial (Ulum, 2012 :20).

Menurut Halim (2004:24) kinerja keuangan Daerah ataukemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihatkemampuan Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebutberupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerahberupa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di dalam organisasi Pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan adabeberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasiopertumbuhan, dan rasio keserasian/aktivitas.

### **Kajian Pustaka**

Penelitian yang dilakukan oleh Suyatin (2015) tentang, “Analisis kinerja keuangan daerah kota samarinda Tahun 2013-2014”. Metode penelitian yang digunakan adalah data skunder, dimana Rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013. Artinya kemampuan Kota Samarinda untuk membiayai pembangunan daerahnya dengan menggunakan PAD

semakin meningkat. Ini mendukung analisa sebelumnya yang menunjukkan bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Dilihat dari rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 kinerja pemerintah daerah untuk memobilisasi penerimaan PAD tergolong sangat efektif. Dimana rasio efektifitas diatas 100%. Target penerimaan PAD terlampaui. Namun di tahun 2014 kemampuan merealisasikan target penerimaan PAD tergolong kurang efektif, target penerimaan PAD tidak tercapai.

Hal ini perlu untuk dikaji dan menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda. Tidak tercapainya target penerimaan bisa disebabkan melemahnya kinerja pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan, dan bisa juga terlalu tingginya dalam menetapkan target penerimaan. Bila dilihat dari tabel 1 dan tabel 2, tidak tercapainya target penerimaan PAD disebabkan oleh tidak tercapainya target retribusi perizinan tertentu, serta sumbangan terbesar berasal dari tidak tercapainya target pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Apabila dilihat dari realisasi penerimaan, untuk pos pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasi penerimaan tahun 2014 lebih besar dari pada tahun 2013. Tetapi karena target tahun 2014 naik empat kali lipat dari target 2013, maka menyebabkan rasio efektifitas PAD menjadi kurang efektif.

Dengan demikian kemungkinan besar tidak tercapainya target penerimaan lebih disebabkan dari kurang tepatnya dalam penentuan target penerimaan. Rasio efektivitas pajak daerah baik tahun 2013 maupun tahun 2014 menunjukkan angka di atas 1 atau lebih dari 100%. Ini artinya, baik tahun 2013 maupun tahun 2014 kemampuan pemerintah Kota Samarinda dalam mengumpulkan pajak daerah tergolong baik, mampu memenuhi jumlah yang ditargetkan. Walaupun tahun 2014 mengalami penurunan, tetapi masih tergolong baik. Berdasarkan analisis rasio keuangan daerah maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemerintah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan desentralisasi semakin baik, hal ini dapat dilihat dari derajat desentralisasi yang meningkat.

Tingkat ketergantungan keuangan pemerintah Kota Samarinda semakin kecil, serta kemandirian keuangan daerah semakin tinggi. Namun demikian kemampuan pemerintah Kota Samarinda dalam memobilisasi penerimaan PAD

mengalami penurunan, dimana di tahun 2014 tergolong kurang efektif. Berbeda dalam hal efektifitas pajak daerah. Kemampuan pemerintah Kota Samarinda dalam menghimpun pajak tergolong baik untuk tahun 2013 maupun tahun 2014. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah Kota Samarinda mengalami peningkatan pada tahun 2014.

### **Landasan Teori**

Menurut Halim (2004 :150) rasio keuangan untuk menilai kinerja APBD terdiri dari:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) adalah kemandirian keuangan daerah (otonomi daerah) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. rasio tersebut dapat dirumuskan:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propensi Dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi, sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat kemampuan Daerah

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian</b>	<b>Pola hubungan</b>
Rendah Sekali	0% -25%	Instruktif
Rendah	25% -50%	Konsultatif
Sedang	50% -75%	Partisipatif
Tinggi	75% -100%	Delegatif

*Sumber : Hermi oppier dalam Pramita (2015:33)*

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
  - 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
  - 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
  - 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (RPAD)

Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{RPAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan riil Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun dalam Pramita (2015:30) adalah :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (  $\text{RPAD} < 100\%$  ) berarti tidak efektif.
  - 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (  $\text{RPAD} = 100\%$  ) berarti efektivitas berimbang.
  - 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (  $\text{RPAD} > 100\%$  ) berarti efektif
3. Rasio Aktifitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektif tidaknya pemerintah didalam menggunakan dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Rasio keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang

dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja pelayanan publik (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim,2007:236).

Keserasian dirumuskan sebagai berikut

$$\text{:Rasio Belanja Rutin (RBR)} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Dan

Rasio Belanja Pembangunan (RBP)

$$= \frac{\text{Total belanja pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Adapun Kriteria Aktifitas, perbandingannya diukur dengan kriteria pengukuran kinerja ekonomis dapat dilihat di tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.2 Kriteria Kinerja Keuangan Aktifitas

Presentase	Kemampuan Keuangan
0%-25%	Rendah sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

*Sumber : Mahmudi dalam Umar(2014)*

#### 4. Rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*)

RDSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah (PAD), bagian daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo (Halim,2007:238). Rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RDSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (pokok angsuran} + \text{bunga} + \text{biaya} + \text{pinjaman)}} \times 100\%$$

Dimana:

RDSCR	= Rasio <i>Debt Service Coverage Ratio</i>
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
BD	= Bagian Daerah
DAU	= Dana Alokasi Daerah
BW	= Belanja Wajib

Adapun kriteria RDSCR, perbandingannya diukur dengan kriteria pengukuran kinerja ekonomis dapat dilihat di tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.3 Kriteria Kinerja Keuangan RDSCR

Presentase	Kemampuan keuangan
Diatas 2,5	Sangat layak
2,5-1	Layak
Kurang dari 1	Belum layak

Sumber :Mahmudi dalam Umar (2014)

#### 5. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan (Mahmudi dalam Pramita 2015:32) adalah sebagai berikut :

$$RP = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

RP = Rasio Pertumbuhan

$P_n$  = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

$P_0$  = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelumnya).

#### 6. Analisis Karakteristik

Berdasarkan hasil scoring tersebut dapat di diskripsikan score kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan

pada masing-masing tahun dan perbandingan setiap tahunnya, dengan kriteria scorenya sebagai berikut ini:

- 1) Score 1-25 menunjukkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak baik (TB).
- 2) Score 26-50 menunjukkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cukup (C).
- 3) Score 51-75 menunjukkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik (B).
- 4) Score >76 (lebih besar dari tujuh puluh enam) menunjukkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat baik (SB).

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder (internal) yaitu data yang tidak diperoleh dari tangan pertama atau data dari sumbernya langsung, tetapi diperoleh dari pihak lain, yaitu data dari pemerintah Kabupaten Pamekasan. Data tersebut berupa data geografis Kabupaten Pamekasan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2013-2015, adapun cara yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah melalui dokumentasi dimana pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis semacam laporan arsip-arsip, catatan dan media tertulis lainnya.

### **Pembahasan**

Data tentang target dan realisasi pendapatan daerah kabupaten pamekasan tahun anggaran 2013 s/d 2015. Data ini bersumber dari Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.

Tabel 4.1: Target pencapaian PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain PAD yang sah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015



No	Tahun Anggaran	Uraian	Target	Realisasi	Prosentase
1.	2013	APBD	1.199.763.35 1.402,53	1.219.849.02 4.308,55	101,67
		PAD	81.876.726.4 85,53	89.462.536.5 35,55	109,26
		Dana perimbangan :	846.874.194. 380,00	864.973.186. 637,00	102,14
		- Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak	47.192.197.3 80,00	65.291.189.6 37,00	138,35
		- Dana alokasi umum	702.610.217. 000,00	702.610.217. 000,00	100,00
		- Dana alokasi khusus	97.071.780.0 00,00	97.071.780.0 00,00	100,00
		Lain-lain PAD yang sah	271.012.430. 537,00	265.413.301. 136,00	97,93
2.	2014	APBD	1.457.260.75 5.011,85	1.527.493.49 4.940,97	104,82
		PAD	123.545.229. 169,85	171.518.204. 166,97	138,83
		Dana perimbangan :	973.272.285. 945,00	985.006.999. 351,00	101,21
		- Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak	83.135.518.9 45,00	94.870.232.3 51,00	114,12
		- Dana alokasi umum	788.617.777. 000,00	788.617.777. 000,00	100,00

		- Dana alokasi khusus	101.518.990. 000,00	101.518.990. 000,00	100,00
		Lain-lain PAD yang sah	360.105.151. 771,00	370.968.291. 423,00	102,02
3.	2015	APBD	1.668.382.24 5.156,29	1.681.794.66 9.633,19	100,80
		PAD	144.288.155. 336,62	170.258.939. 684,19	118,00
		Dana perimbangan :	1.068.662.78 5.000,00	1.053.832.74 0.582,00	98,61
		- Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak	107.390.062. 000,00	92.560.017.5 82,00	86,19
		- Dana alokasi umum	817.903.633. 000,00	817.903.633. 000,00	100,00
		- Dana alokasi khusus	143.369.090. 000,00	143.369.090. 000,00	100,00
		Lain-lain PAD yang sah	455.431.304. 819,67	457.702.992. 367,00	100,50

*Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan*

Tabel 4.2: Target pencapaian PAD dan kontribusinya terhadap APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015

No	Th Anggaran	APBD	Target PAD	Realisasi PAD	Prosentase PAD	Prosentase kontribusi PAD
1.	2013	1.219.849.	81.876.7	89.462.536.	109,26	7,33

		024.308,5 5	26.485,5 3	535,555		
2.	2014	1.527.493. 494.940,9 7	123.545. 229.169, 85	171.518.204 .166,97	138,83	11,22
3.	2015	1.681.794. 669.633,1 9	144.288. 155.336, 62	170.258.939 .684,19	118,00	10,12

Sumber : Dinas Pendapatan kabupaten pamekasan

Tabel 4.3: Daftar Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015

No	TA	Jenis Belanja				Total Belanja
		Rutin	Pembangunan	Tak terduga	Transfer	
1.	2013	1.018.371. 942.922,0 3	146.091.858.5 18,00	1.327.875.6 00,00	1.780.000.0 00,00	1.167.571. 677.040,0 3
2.	2014	1.139.105. 122.297,0 0	240.818.085.1 79,00	3.103.255.0 00,00	2.081.065.3 00,00	1.385.107. 527.776,0 0
3.	2015	1.298.332. 886.532,0 0	447.685.501.9 09,00	3.187.436.4 95,00	1.949.485.6 55,52	1.751.155. 310.591,5 2

Sumber : Dinas Pendapatan dan BPKA Kabupaten Pamekasan

Tabel 4.4 Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015

Tahun anggaran	Realisasi PAD	Transfer	RKKD	Pola hubungan
2013	89.462.536.535,555	864.973.186.637,00	10,34	Instruktif
2014	171.518.204.166,97	985.006.999.351,00	17,41	Instruktif
2015	170.258.939.684,19	1.053.832.740.582,00	16,16	Instruktif

Rata-rata	14,62	Instruktif
-----------	-------	------------

*Data diolah (2016)*

Berdasarkan hasil penghitungan pada tabel 4.4 di atas kemampuan keuangan daerah kabupaten pamekasan tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.5 Penghitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	REPAD	Kriteria
2013	89.462.536.535,55	81.876.726.485,53	109,26	Efektif
2014	171.518.204.166,97	123.545.229.169,85	138,83	Efektif
2015	170.258.939.684,19	144.288.155.336,62	118,00	Efektif
Rata-rata			122,03	Efektif

*Data diolah (2016)*

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 s/d 2015 adalah sangat efektif. Karena setiap tahunnya Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah melebihi dari 100%, dimana ditahun dasar yaitu pada tahun 2013 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerahnya sebesar 109,26%, ditahun berikutnya pada tahun 2014 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerahnya sebesar 138,83% dan ditahun 2015 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerahnya sebesar 118,00%.

Tabel 4.6 Penghitungan Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015

Tahun Anggaran	Total Belanja Rutin	Total APBD	Prosentase	Kemampuan Keuangan
----------------	---------------------	------------	------------	--------------------

2013	1.018.371.942.922 ,03	1.219.849.024.308 ,55	83,48	Tinggi
2014	1.139.105.122.297 ,00	1.527.493.494.940 ,97	74,57	Sedang
2015	1.298.332.886.532 ,00	1.681.794.669.633 ,19	77,20	Tinggi
Rata-rata			78,42	Tinggi

*Data diolah (2016)*

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan Rasio Belanja Rutin Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dari tahun anggaran 2013 s/d 2015 mengalami penurunan. Namun kategori kemampuan keuangan daerah ditahun 2013 tinggi, ditahun 2014 mengalami penurunan menjadi sedang dan ditahun 2015 mengalami peningkatan menjadi tinggi kembali. Ketika diprosentasekan Rasio Belanja Rutin Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dari tahun anggaran 2013 s/d 2015 adalah ditahun 2013 sebesar 83,48%, ditahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 74,57% dan ditahun 2015 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 77,20%.

Tabel 4.7 Penghitungan Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD  
Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015

Tahun Anggaran	Total Belanja Pembangunan	Total APBD	RBP	Kemampuan Keuangan
2013	146.091.858.518,0 0	1.219.849.024.308,5 5	11,9 8	Rendah sekali
2014	240.818.085.179,0 0	1.527.493.494.940,9 9	15,7 7	Rendah sekali
2015	447.685.501.909,0 0	1.681.794.669.633,1 1	26,6 2	Rendah

Rata-rata	18,1 2	Rendah sekali
-----------	-----------	------------------

*Data diolah (2016)*

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa Rasio Belanja Pembangunan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 mengalami kenaikan dimana ditahun dasar yaitu tahun 2013 total belanja pembangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebesar 11,98%, total belanja pembangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan sebesar 3,79% menjadi sebesar 15,77% di tahun 2014, dan total belanja pembangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan ditahun 2015 mengalami kenaikan juga sebesar 10,85% menjadi sebesar 26,62%.

Tabel 4.8 Hasil Penghitungan Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (RDSCR) Terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015

Tahun	RDSCR	Kriteria	Kemampuan Keuangan
2013	19,14	Diatas 2,5	Sangat Layak
2014	52,21	Diatas 2,5	Sangat Layak
2015	26,41	Diatas 2,5	Sangat Layak
Rata-rata	32,59	Diatas 2,5	Sangat Layak

*Data diolah (2016)*

RDSCR Tahun Anggaran 2013:

RDSCR

$$= \frac{(89.462.536.535,55 + 65.291.189.637,00 + 702.610.217.000,00) - 650.175.115.911,33}{10.822.550.125,00}$$

$$\times 100\% = \frac{207.188.827.261,22}{10.822.550.125,00} \times 100\% = 19,14$$

RDSCR Tahun Anggaran 2014:

RDSCR

$$= \frac{(171,518,204,166.97 + 94,870,232,351.00 + 788,617,777,000.00) - 711,181,906,429.00}{6,585,253,270.18}$$

$$\times 100\% = \frac{343,824,307,088.97}{6,585,253,270.18} \times 100\% = 52,21$$

RDSCR Tahun Anggaran 2015:

RDSCR

$$= \frac{(170,258,939,684.19 + 92,560,017,582.00 + 817,903,633,000.00) - 747,549,026,076.00}{12,614,681,537.73}$$

$$\times 100\% = \frac{333,173,564,190.19}{12,614,681,537.73} \times 100\% = 26,41$$

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan sangat melebihi target dari apa yang sudah ditetapkan sebagai criteria dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dilihat dari kemampuan keuangannya sangatlah layak karena dari tahun anggaran 2013 s/d 2015 Pemerintah Pamekasan melebihi kriteria 2,5 dalam Rasio *Debt Service Coverage Ratio*(RDSCR).

Tabel 4.9 Penghitungan Rasio Pertumbuhan Terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015

Keterangan	2013	2014	2015	Rata-rata
PAD	89.462.536.535, 55	171.518.204.16 6,97	170.258.939.68 4,19	
Pertumbuhan PAD	-	91,72%	-0,73%	45,49 %
Total pendapatan	1.219.849.024.3 08,55	1.527.493.494.9 40,97	1.681.794.669.6 33,19	
Pertumbuhan	-	25,22%	10,10%	17,66 %

pendapata n				
Belanja rutin	1.018.371.942.9 22,03	1.139.105.122.2 97,00	1.298.332.886.5 32,00	
Pertumbu han belanja rutin	-	11,86%	13,98%	12,92 %
Belanja pembangu nan	146.091.858.51 8,00	240.818.085.17 9,00	447.685.501.90 9,00	
Pertumbu han belanja pembangu nan	-	64,84%	85,90%	75,37 %
Rata-rata		48,41%	27,31%	37,86 %

*Data diolah (2016)*

Berdasarkan rasio pertumbuhan kinerja APBD pemerintah kabupaten pamekasan dari tahun anggaran 2013 s/d 2015 menunjukkan pertumbuhan yang positif dimana pada tahun 2014 rata-ratanya sebesar 48,41% dan tahun 2015 rata-ratanya sebesar 27,31%.

Berdasarkan scoring Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan score >25 dengan kategori kinerja tidak baik, score Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD) menunjukkan score >76 dengan kinerja sangat baik, score Rasio Aktivitas yang terdiri dari Rasio Belanja Rutin (RBR) menunjukkan score >76 dengan kategori kinerja sangat baik dan Rasio Belanja Pembangunan (RBP) menunjukkan score <25 dengan kategori kinerja tidak baik, score Rasio *Debt Service Coverage Ratio*(RDSCR) menunjukkan score



<50 dengan kriteria kinerja cukup dan sore Rasio Pertumbuhan (RP) menunjukkan score <50 dengan kriteria kinerja cukup.

### **Kesimpulan**

Kemandirian keuangan daerah tergolong masih sangat rendah, dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah. Efektifitas pendapatan asli daerah sangat efektif karena setiap tahunnya prosentase rasionya diatas seratus persen. Dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan lebih memprioritaskan pada kepentingan belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan sehingga pembangunan kurang dinikmati oleh masyarakat. *Debt Service Coverage Rasio* kinerja APBD pemerintah kabupaten pamekasan sangat efektif . Pertumbuhan kinerja APBD pemerintah kabupaten pamekasan menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan scoring Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan score >25 dengan kategori kinerja tidak baik, score Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD) menunjukkan score >76 dengan kinerja sangat baik, score Rasio Aktivitas yang terdiri dari Rasio Belanja Rutin (RBR) menunjukkan score >76 dengan kategori kinerja sangat baik dan Rasio Belanja Pembangunan (RBP) menunjukkan score <25 dengan kateori kinerja tidak baik, score Rasio *Debt Service Coverage Ratio*(RDSCR) menunjukkan score <50 dengan kriteria kinerja cukup dan sore Rasio Pertumbuhan (RP) menunjukkan score <50 dengan kriteria kinerja cukup.

**Daftar Pustaka**

Badan Pengelolaann Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan

Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekas

Halim, A 2007, *Akuntansi Sektor Public Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Edisi 3 Penerbit Salemba Empat

Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Edisi Dua.

Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Suyatin. S. (2015).” Analisis Rasio Keuangan Daerah Kota Samarindah Tahun 2013-2014” .Jurnal dedikasi 2015

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Ulum, Ihyaul. (2012). *Audit Sektor Publik; Sebuah Pengantar*, Bumi Aksara, Jakarta.

[www.pemdakab.co.id](http://www.pemdakab.co.id)